



**PERANAN BAMBANG SUGENG SEBAGAI PANGLIMA  
DIVISI/GUBERNUR MILITER III DI JAWA TENGAH DAN  
YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI PENDUDUKAN  
BELANDA 1948-1949**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh:**

**WAHYU SETYANINGSIH**

**NIM. 13030114140104**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Wahyu Setyaningsih, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesajaraan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 02 Juli 2018

Penulis,

Wahyu Setyaningsih

NIM. 13030114140104

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

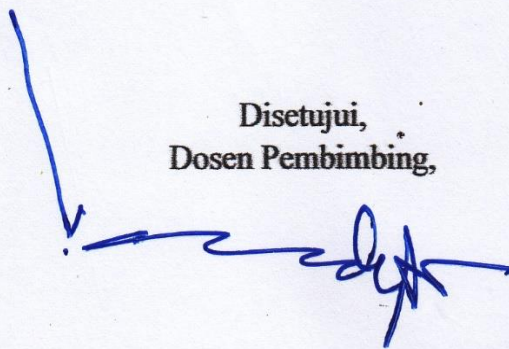
### *MOTTO*

**“Tiga hal yang menjadi kunci keberhasilan seseorang adalah: kerja keras, kerja cerdas, dan kerja Ikhlas”**

(Drs. D.G.B Irawan, M.M)

Dipersembahkan untuk:  
Ibuku, Bapak ku, dan orang-orang yang  
telah menjadi perisai bagi ku.

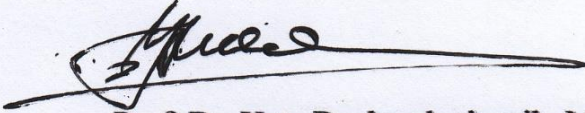
Disetujui,  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left that curves into a horizontal line with a stylized, cursive flourish on the right.

Dr. Indriyanto, S.H, M.Hum  
NIP 196407111990011001

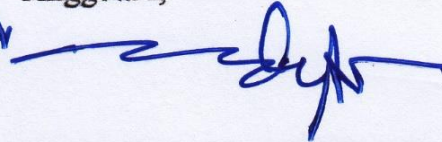
Skripsi dengan judul "Peranan Bambang Sugeng Sebagai Panglima Divisi III/ Gubernur Militer III di Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam Menghadapi Pendudukan Belanda 1948-1949" yang disusun oleh Wahyu Setyaningsih (NIM 13030114140104) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Senin, 02 Juli 2018

Ketua,



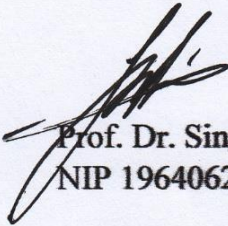
Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si  
NIP 196106051986032001

Anggota I,



Dr. Indriyanto, S.H, M.Hum  
NIP 196407111990011001

Anggota II,



Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum  
NIP 196406261989031003

Anggota III,



Dra. Sri Indrahti, M.Hum  
NIP 196602151991032001

Mengesahkan,  
Dekan



Dr. Rehyanto Noor, M.Hum  
NIP 195907071986031002

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya atas kuasa dan kehendak-Nya, skripsi yang berjudul “Peranan Bambang Sugeng Sebagai Panglima Divisi/Gubernur Militer III di Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam Menghadapi Pendudukan Belanda 1948-1949” dapat terselesaikan sebagai syarat utama untuk menyelesaikan studi pada Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Redyanto Noor, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah berkenan memberi izin dan kemudahan bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haryono Rinardi, M.Hum selaku Sekertaris Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan pengampu mata kuliah Metodologi Sejarah yang telah memberikan bekal pengetahuan, dorongan, semangat, dan mengantarkan penulis dalam melakukan heuristik. Dengan penuh kesabaran dan perhatian layaknya seorang ayah bagi penulis, beliau selalu mendengarkan keluh kesah yang dihadapi penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Indriyanto, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberi bimbingan, arahan, dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Rabith Jihan Amaruli, S.S, M.Hum, selaku dosen wali yang telah memberikan perhatian dan bimbingan untuk pengembangan potensi akademik penulis. Ucapan terima kasih

juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum, dan Dra. Sri Indrahti, M.Hum yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas berkat perhatian dan bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo, Bapak Abdullah, Bapak Arif Lazuardi, dan Ibu Savitri yang telah menyempatkan untuk menjadi informan dan bersedia memberikan keterangan tambahan guna dijadikan sumber untuk penulisan skripsi. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada segenap Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis guna mendapatkan sumber-sumber penulisan. Kepada Pak Widi, Mbak Kiki, Bu Wiwik dan segenap keluarga besar Arsip Nasional Republik Indonesia, penulis menyampaikan terima kasih atas segala pelayanannya yang telah diberikan. Kepada Letkol Suhasno Hari, Letkol Prasetyo Pujiarno, Letkol Chafidzin Widodo, Pak Sulis, Ibu Etik, dan segenap keluarga besar Dinas Sejarah Angkatan Darat, penulis menyampaikan terima kasih atas izin dan pelayanannya yang sangat baik guna mendukung kegiatan heuristik penulis. Kepada Ibu Rohani, Mayor Lilik dan segenap keluarga besar Perpustakaan KODAM IV/Diponegoro (Museum Mandala Bhakti) penulis mengucapkan terima kasih atas izin dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan heuristik.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejarah angkatan 2014 dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk perhatian, bantuan, dukungan dan kebersamaan selama ini. Penulis mengucapkan terima kasih juga kepada Fanada Solihah, S. Hum dan Agung

Riyadi, S.Hum (sejarah angkatan 2013) yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Terakhir namun tidak terlupakan, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Titik Suprapti, selaku ibunda penulis yang dengan sabar dan penuh kasih sayang telah memberikan dorongan moral serta material untuk menggapai cita-cita penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar Mulyodimejo yang telah memberikan perhatian, dorongan, dan kasih sayang kepada penulis.

Sebagai peneliti pemula, skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, semua saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik dan pembelajaran serta bagi manusia-manusia yang haus akan ilmu pengetahuan.

Semarang, 2 Juli 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	x
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xviii
<b>ABSTRAK</b>	xvix
<b>ABSTRACT</b>	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TERRITORIAL DIVISI III</b>	
A. Kondisi Geografi	21
B. Kondisi Demografi	26
C. Kondisi Sumber Daya Sosial dan Ekonomi	28
D. Kondisi Politik	35
<b>BAB III BAMBANG SUGENG: PROFIL DAN KARIER MILITER</b>	
A. Masa Muda	49
B. Perjuangan Masa Awal Proklamasi Kemerdekaan RI	56
C. Pengabdian Sebagai Panglima Divisi III	75
<b>BAB IV DIVISI III MENGHADAPI PENDUDUKAN BELANDA</b>	
A. Penguatan Pimpinan Divisi III	88
B. Mobilisasi Personal dan Penguatan Organisasi	99
C. Pelaksanaan Operasi Menghadapi Belanda	110
D. Strategi dan Taktik dalam Operasi	127
<b>BAB V SIMPULAN</b>	138
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	140
<b>DAFTAR INFORMAN</b>	147
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan Darat
A.H	: Abdul Haris
AMS	: <i>Algemene Middelbare School</i>
AP	: Angkatan Perang
AUI	: Angkatan Umat Islam
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
BPKNIP	: Badan Pekerja Komisi Nasional Indonesia Pusat
BPRI	: Barisan Pemberontakan Republik Indonesia
CDT	: Comando Daerah Territorium
DI	: Darul Islam
Disbintalad	: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat
Djapen	: Djawatan Penerangan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Drs	: Doktorandus
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
Gaperta	: Gabungan Persatuan Tani

GM	: Gubernur Militer
H	: Haji
HB	: Hamengku Buwono
HIS	: <i>Hollandsch Inlandsche School</i>
Ir	: Insinyur
Intr	: Instruksi
KA	: Kereta Api
KODAM	: Komando Daerah Militer
KODM	: Komando Operasi Distrik Militer
KNID	: Komisi Nasional Indonesia Daerah
KNIL	: <i>Koninklijk Nederlandesche-Indische Leger</i>
KSAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
KSAP	: Kepala Staf Angkatan Perang
KTN	: Komisi Tiga Negara
LetKol	: Letnan Kolonel
M	: Muhammad
Masyumi	: Majelis Syuro' Muslimin Indonesia
MBKD	: Markas Besar Komando Djawa

MBKS	: Markas Besar Komando Sumatera
MBT	: Markas Besar Tentara
MULO	: <i>Meer Uitgebreid lager Onderwijs</i>
NICA	: <i>Nederlandsche Indie Civil Administratie</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pangsar	: Panglima Besar
Pasindo	: Partai Sosialis Indonesia
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa
Pesindo	: Pemuda Sosialis Indonesia
PETA	: Pembela Tanah Air
PKI	: Partai Komunis Indonesia
Plm	: Panglima
P. M	: Perdana Menteri
PP	: Persatuan Perjuangan
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PTTD	: Panglima Tentara Territorial Djawa
PTTS	: Panglima Tentara Territorial Sumatera

Re-Ra	: Rekonstruksi Rekonsiliasi
RHS	: <i>Rechtshoogeschool</i>
RI	: Republik Indonesia
Sobsi	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SR	: Sekolah Rakyat
SR	: Serikat Rakyat
STC	: Sub Territorial Comando
STM	: Sub Territorial Mobil
SWK	: Sub Wehrkreise
SWKS	: Sub Werhkreise Sektor
TII	: Tentara Islam Indonesia
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
TLRI	: Tentara Laut Republik Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRI	: Tentara Republik Indonesia
WK	: Wehrkreise

## DAFTAR ISTILAH

- artileri* : sebutan untuk kesenjataan, pengetahuan kesenjataan, pasukan, serta persenjataan yang berupa senjata berat dan jarak jauh.
- bandekan* : ragam bahasa Jawa yang berkembang dan digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah eks Karasidenan Kedu.
- batalyon* : satuan militer yang terdiri dari dua sampai enam kompi, biasanya dipimpin oleh seorang Mayor atau Letkol.
- blokade* : penutupan suatu daerah atau kawasan, tempat atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas
- brigade* : satuan militer di bawah divisi, yang terdiri dari 3.000 hingga 5.000 orang, dipimpin oleh seorang Kolonel atau Brigadir Kolonel. Brigade terbentuk dari dua sampai empat batalyon, yang biasanya berupa tiga batalyon unsur tempur, unsur bantuan tempur, dan unsur bantuan administrasi.
- budancho* : pangkat bagi seorang komandan regu dalam tentara PETA pada zaman Jepang, dipilih dari mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar.
- cudancho* : pangkat bagi seorang komandan kompi dalam tentara PETA pada zaman Jepang, dipilih dari mereka yang telah bekerja namun belum memiliki jabatan yang tinggi, seperti para guru dan juru tulis.
- daidancho* : pangkat bagi seorang komandan batalyon dalam tentara PETA pada zaman Jepang, mereka dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka, seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, para politikus, penegak hukum, dan sebagainya.
- demoralisasi* : merosotnya atau menurunnya moral seseorang yang tercermin pada perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai di dalam masyarakat.
- dipreteli* : cara merusak suatu benda dengan cara memotong-motong atau membagi menjadi bagian kecil-kecil dan bertujuan untuk menghancurkan.

<i>disepuh</i>	: cara menguatkan mental bagi para laskar pejuang kemerdekaan dengan cara memberikan doa atau mantra pada senjata tradisional yang digunakan.
disorganisasi	: proses melemahnya atau berputarnya norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat karena adanya perubahan sosial yang mana tidak ada lagi keserasian pada bagian-bagian dari suatu keutuhan organisasi.
distrik	: wilayah administrasi pada zaman kolonial Hindia Belanda yang mana wilayah itu setingkat dengan Kawedanan dan di atas Kecamatan.
divisi	: satuan tempur militer yang berkekuatan penuh, yakni memiliki kesatuan-kesatuan tempur sendiri, dan unsur pendukungnya yaitu bantuan tempur dan bantuan administrasi.
<i>employe</i>	: sebutan untuk seorang karyawan perusahaan pada zaman Belanda.
eufinisme	: suatu ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan ungkapan yang dinilai kasar.
feodalisme	: struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan oleh bangsawan untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaim melalui kerja sama dengan para pemimpin lokal sebagai mitra.
gerilya	: perang yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, ada sabotase, dan dilakukan dalam lingkup kecil namun sangat difokuskan pada titik tertentu dan berjalan secara efektif.
<i>giyuhei</i>	: sebutan untuk prajurit sukarela dalam tentara PETA dan dipilih dari mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar.
<i>gudig</i>	: penyakit gatal pada kulit yang disebabkan oleh tungau atau kutu kecil yang bernama <i>Sarcoptes scabiei</i> varian hominis, ditandai dengan keluhan gatal, terutama pada malam hari dan mudah menular melalui kontak langsung atau tidak langsung.
<i>gunseikan</i>	: sebutan untuk Kepala Pemerintahan Militer pada zaman Jepang, biasanya dirangkap oleh seorang kepala staf tentara.
<i>hizbullah</i>	: laskar rakyat pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yang berasal dari golongan santri dan bersenjata tradisional.

<i>infiltrasi</i>	: menempatkan seseorang atau beberapa orang ke daerah sasaran di daerah lawan dengan aksi menyeberangi perbatasan lawan atau suatu daerah yang dikawal oleh lawan.
<i>klerk</i>	: sebutan untuk pegawai Pemerintah Sipil pada zaman Pendudukan Jepang, seperti juru tulis.
<i>ngapak</i>	: ragam bahasa Jawa yang berkembang dan digunakan oleh masyarakat di daerah eks Karasidenan Banyumas.
<i>palawija</i>	: istilah tanaman pangan selain padi yang berkembang dalam masyarakat petani Jawa, tanaman itu berupa jagung, ubi, kacang-kacangan, dan sebagainya.
<i>plebisicite</i>	: pemungutan suara yang dilakukan pada seluruh populasi suatu negara untuk menyikapi proposal atau kebijakan tertentu.
<i>provincialisme</i>	: paham atau ajaran dalam politik yang lebih mementingkan atau mengutamakan daerah provinsi sendiri.
<i>reaksioner</i>	: sikap politik seorang warga negara yang serba aktif dan reaktif dalam menanggapi suatu keadaan negara, biasanya selalu mempertanyakan dan banyak menuntut kepada Pemerintah.
<i>regenschap</i>	: istilah untuk menyebut kabupaten pada zaman Hindia Belanda, di mana wilayah itu dipimpin oleh seorang <i>regent</i> atau wakil penguasa pada saat itu.
<i>rekonstruksi</i>	: penyusunan dan pengembalian suatu organisasi pada kondisi semula untuk mencapai keteraturan.
<i>rekonsiliasi</i>	: kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dalam suatu negara.
<i>shodancho</i>	: pangkat untuk komandan pleton dalam tentara PETA pada zaman Jepang, mereka dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan pertama atau sekolah lanjutan atas.
<i>single parent</i>	: istilah dari orang tua tunggal yang mengayuh biduk rumah tangganya sendiri tanpa pasangan hidup, hal ini terjadi karena perceraian atau kematian dari salah satu pasangan baik pria maupun wanita.
<i>skwadron</i>	: kesatuan tempur dalam Angkatan Udara yang biasanya terdiri dari 12 hingga 24 pesawat .



- werkreise* : lingkaran atau daerah pertahanan yang digunakan TNI sebagai strategi dalam menghadapi Agresi Militer Belanda ke-II.
- wingate* : aksi gerilya yang dilakukan dengan menyusup ke daerah musuh, yaitu dengan cara menyusup ke semua penjuru.
- yonif* : satuan dasar tempur pasukan infanteri TNI di bawah brigade atau resimen, yang merupakan bagian taktik dari suatu brigade dan dapat berdiri sendiri dengan tugas taktik dan administrasi.

## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Penetapan Presiden No: 25 Tahun 1948
- B. Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30/A/49
- C. Peta Wilayah Divisi III
- D. Foto Prasasti “Aku Berpesan”
- E. Foto Rumah Bambang Sugeng dan Keluarga di Kranggan, Temanggung
- F. Foto Prasasti Seloeroeh Doenia Satoe Keloearga
- G. Foto Rumah Peninggalan Mertua Bambang Sugeng yang dijadikan markas gerilya di Banjarnegara
- H. Bagan Struktur Organisasi Divisi III sesuai Penetapan Presiden No. 14 th 1948 dan Intr. Plm. M.B.K.D/ Mobil/48 tgl 25 Desember 1948
- I. Pengumuman Pemerintah
- J. Instructie No. 117/G.M/48/Ed
- K. Maklumat No. 46/MKL/D3/49
- L. Instruksi Rahasia Tanggal 18/11/1949

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Peranan Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi/GM III di Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam menghadapi Pendudukan Belanda 1948-1949”, mengkaji tentang tokoh Bambang Sugeng dan peranannya dalam Divisi III yang berhasil memberi sumbangan pemikiran untuk penegakan kedaulatan RI dan eksistensi TNI, namun tidak dikenal oleh masyarakat luas. Penelitian ini hendak mengetengahkan tiga permasalahan sebagai berikut: *pertama*, penyebab Bambang Sugeng tidak dikenal oleh masyarakat luas. *Kedua*, perjalanan karir Bambang Sugeng hingga menjadi Panglima Divisi/Gubernur Militer III. *Ketiga*, peranan yang dilakukan oleh Bambang Sugeng sebagai seorang Panglima.

Penelitian ini menerapkan metode sejarah dan menggunakan konsep prajurit, di mana Bambang Sugeng tidak hanya sebagai seorang Panglima yang bertugas mengatur anak buah, namun juga sebagai seorang prajurit yang bertugas mempertahankan negara. Sementara itu, lingkup keilmuan dalam skripsi ini adalah sejarah militer khususnya yang terkait dengan peranan tokoh Bambang Sugeng dalam kehidupan TNI. Adapun pendekatan yang digunakan adalah politik-militer. Bambang Sugeng yang menjabat sebagai Panglima Divisi/GM III mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kehidupan politik di Indonesia pada saat itu. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perang di Divisi III dalam menghadapi serangan musuh.

Selanjutnya, dalam kerangka peranan, Bambang Sugeng yang menjabat pada 1948-1949 memberi pengaruh yang signifikan bagi kehidupan TNI di Divisi III. Hal itu antara lain: melakukan penguatan pimpinan Divisi III, melakukan mobilitas personal dan penguatan organisasi untuk kebutuhan perang, melakukan perjuangan gerilya, dan menyusun strategi serta taktik dalam operasi. Setelah Belanda melancarkan Agresi Militer ke-II, Bambang Sugeng menyusun strategi dan taktik gerilya yang lebih terstruktur. Operasi dijadwalkan dan difokuskan hanya pada satu tempat tertentu, sementara di tempat lain juga dilakukan serangan pengacau untuk memecah konsentrasi musuh. Memasuki bulan Februari 1949, Sri Sultan HB IX memberi gagasan untuk membuktikan eksistensi TNI. Hal itu selanjutnya direspon oleh Bambang Sugeng dengan penuh semangat dan memberi tugas kepada Letkol Soeharto untuk melakukan serangan gerilya sekaligus pendudukan kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949 meskipun dalam waktu beberapa jam. Hal itu mencapai keberhasilan dan sangat menarik perhatian dunia untuk lebih bersimpati kepada Indonesia. Bambang Sugeng adalah seorang Panglima yang tegas tetapi bersikap rendah hati. Sumbangan pemikiran, sikap, dan cara Bambang Sugeng selama memimpin kesatuan di Divisi III itu selanjutnya menginspirasi para prajurit di Divisi III untuk tetap melakukan perjuangan gerilya hingga tercapainya perjanjian Roem-Royen. Penguatan pimpinan dan organisasi yang telah dilakukan oleh Bambang Sugeng kemudian menjadi cikal-bakal pembentukan KODAM IV/Diponegoro.

## ABSTRACT

*Thesis entitled "The role of Bambang Sugeng as Commander of Military Division / Governor III in Central Java and Yogyakarta in the face of Dutch Occupation 1948-1949", examines the character of Bambang Sugeng and his role in Division III who successfully contributed thoughts for the enforcement of Indonesian sovereignty and the existence of TNI , but is not well known by the public. This research would like to present three problems as follows: first, the cause of Bambang Sugeng is not known by the public. Second, the career of Bambang Sugeng to become Commander of Military Division / Governor III. Third, the role is undertaken by Bambang Sugeng as a Commander.*

*This research applies the historical method and uses the concept of the warrior, in which Bambang Sugeng not only as a Commander in charge of organizing the subordinates but also as a soldier in charge of defending the country. Meanwhile, the scope of scholarship in this thesis is the military history especially related to the role of Bambang Sugeng figure in the life of the TNI. The approach used is political-military. Bambang Sugeng who served as Commander / Division III GM issued policies in line with political life in Indonesia at that time. The policies issued relate to meeting the needs of the war in the Third Division in the face of enemy attacks.*

*Furthermore, within the framework of the role, Bambang Sugeng, who served in 1948-1949, had a significant impact on the life of the TNI in the Third Division. These include: strengthening the leadership of the Third Division, performing personal mobility and strengthening the organization for the needs of war, conducting guerrilla struggle, and devising strategies and tactics in operations. After the Dutch launched the Second Military Aggression, Bambang Sugeng devised a more structured guerrilla strategy and tactics. Surgery is scheduled and focused on only one particular place, while in other places there are also intruder attacks to break down enemy concentrations. Entering February 1949, Sri Sultan HB IX gave the idea to prove the existence of the TNI. It was subsequently responded by Bambang Sugeng vigorously and gave the task to Lieutenant Colonel Soeharto to carry out guerrilla attacks as well as the occupation of the city of Yogyakarta on March 1, 1949, although within a few hours. It achieved success and attracted the world's attention to more sympathetic to Indonesia. Bambang Sugeng is a stern but humble Commander. The contribution of Bambang Sugeng's thoughts, attitudes, and ways during leading the unity in the Third Division further inspired the soldiers in the Third Division to keep up the guerrilla struggle until the Roem-Royen agreement was reached. Strengthening the leadership and organization that has been done by Bambang Sugeng then become the forerunner of the formation of KODAM IV / Diponegoro.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Dalam dekade terakhir ini, negara Indonesia menghadapi masalah tentang kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap para pejuang kemerdekaan. Bambang Sugeng adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang berhasil memegang jabatan sebagai Panglima Divisi/Gubernur Militer (GM) III pada tahun 1948-1949. Selama menjadi Panglima Divisi/GM III, perjuangan Bambang Sugeng belum banyak dikaji.

Minimnya kajian sejarah tentang peran Kolonel Bambang Sugeng selama menjadi Panglima Divisi/GM III menjadikan tokoh ini kurang dikenal oleh masyarakat umum. Bambang Sugeng yang menjalani karir awal di Temanggung itu hanya dikenal oleh sekelompok orang tertentu dan untuk mengenang jasa perjuangannya didirikan monumen yang terletak di Bukit Godheg, Kranggan, Temanggung.<sup>1</sup> Akan tetapi, monumen itu hanya menjadi sebuah bangunan saja tanpa mendapat perawatan yang layak dari Pemerintah maupun masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan tokoh Bambang Sugeng tidak terlalu populer di kalangan masyarakat umum.

Selama ini, kajian mengenai tokoh Bambang Sugeng masih sangat terbatas. Sebagian besar karya-karya yang telah ada mencantumkan peran Bambang Sugeng hanya dalam beberapa alinea dan menjelaskan secara singkat, sehingga memerlukan penjelasan lagi dalam penelitian selanjutnya. Dalam kajian peranan para Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia, Bambang

---

<sup>1</sup> Titi Mumfangati, "Mengenal Monumen Bambang Sugeng di Gumuk Godheg, Temanggung" (<http://bpad.jogjapro.go.id/article/site/view/id/492/t/mengenal-monumen-bambang-sugeng-di-gumuk-godheg-temanggung> diakses pada 27 Maret 2017 pukul 17.00 WIB)

Sugeng sebagai Jenderal yang berpangkat Mayor Jenderal itu belum banyak ditampilkan. Salah satu buku yang mengkaji tentang peranan para Jenderal dari masa Orde Lama hingga Reformasi sama sekali tidak menyebutkan tokoh Bambang Sugeng dan peranannya.<sup>2</sup> Selain itu, dalam karya resmi Dinas Sejarah Angkatan Darat, kajian tentang tokoh Bambang Sugeng lebih memfokuskan pada status dan peranannya sebagai seorang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),<sup>3</sup> yakni suatu masa pengabdianya setelah menjadi Panglima Divisi Brawijaya.<sup>4</sup>

Peranan Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi/GM III di Jawa Tengah bagian barat dan Yogyakarta memang sangat singkat, namun memberi pengaruh besar bagi perjalanan gerilya TNI untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bambang Sugeng mulai menjabat sebagai Panglima Divisi III yang sekaligus bertindak sebagai Gubernur Militer III pada 29 September 1948<sup>5</sup> dan berakhir pada 21 September 1949 ketika diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Indonesia.<sup>6</sup>

Pengabdian Bambang Sugeng dalam Divisi III belum banyak diketahui, sehingga layak untuk ditulis. Kajian tentang peran Bambang Sugeng selama menjabat sebagai Panglima Divisi/GM III masih sedikit. Serangan Umum 1 Maret yang merupakan bukti kegemilangan gerilya TNI untuk mempertahankan NKRI

---

<sup>2</sup>Andi Setiadi, *Derap Politik Para Jenderal Barisan Jenderal Penentu Arah Politik Orde Lama Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Palapa, 2016). Buku tersebut menuliskan jajaran Jendral yang pernah berkiprah dalam dunia militer Indonesia, namun tokoh Bambang Sugeng sama sekali tidak disinggung.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Arif Lazuardi, 12 Juli 2017

<sup>4</sup>Bambang Sugeng menjadi Panglima Divisi Brawijaya sejak 6 Juni 1950. Ia memerintah selama dua tahun kemudian naik jabatan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ke-3 menggantikan A. H Nasution setelah Peristiwa 17 Oktober 1952. “Stamboke Bambang Sugeng”, (Arsip Buku Sejarah Dokumenter Buku Induk Ke II, Dinas Sejarah Angkatan Darat).

<sup>5</sup>“Penetapan Presiden No. 25 tahun 1948”, (Arsip Sekertariat Negara RI no 557, Arsip Nasional Republik Indonesia). Lebih jelasnya lihat lampiran A.

<sup>6</sup>“Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30/A/49”, (Arsip Sejarah Dokumenter Buku Induk ke-2, DISJARAHAD). Lebih jelasnya lihat lampiran B.

dan menyangkut keterlibatannya dalam kajian sejarah versi Orde Baru hanya menonjolkan peran Soeharto dan mengesampingkan Bambang Sugeng sebagai pemberi perintah.<sup>7</sup>

Di tengah kondisi itulah maka peranan Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi/GM III di Jawa Tengah bagian barat dan Yogyakarta selama masa Perang Kemerdekaan menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, fokus dari skripsi ini adalah mengungkapkan peranan Bambang Sugeng dalam memimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Temanggung hingga menjadi Panglima Divisi III/GM III pada 1948-1949. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah *pertama*, Mengapa Bambang Sugeng yang memegang pimpinan pasukan sejak BKR hingga menjadi Panglima Divisi III tidak dikenal sebagai prajurit yang terlibat dalam peristiwa yang dialaminya? *Kedua*, Bagaimana perjalanan karir militer Bambang Sugeng hingga menjadi Panglima Divisi/GM III? *Ketiga*, Bagaimana peranan yang dilakukan Bambang Sugeng dalam Divisi III sebagai seorang Panglima dalam upaya menghadapi Pendudukan Belanda?

## **B. Ruang Lingkup**

Batasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah diperlukan agar penelitian lebih terfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.<sup>8</sup>

Lingkup temporal dari skripsi ini adalah kurun waktu 1948-1949 yaitu masa ketika Negara Indonesia mengalami peristiwa besar, yang kemudian dikenal sebagai masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini banyak terjadi pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan yang kemudian dikenal dengan nama Perang Kemerdekaan Indonesia. Munculnya Perang Kemerdekaan, karena Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka harus mempertahankan kemerdekaan dari

---

<sup>7</sup>Hendri F. Isnaeni, "Pengikat Angkatan Darat", *Historia*, Selasa 24 April 2012

<sup>8</sup>Taufik Abdullah, editor, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 10

serangan tentara sekutu dan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Perang Kemerdekaan Indonesia pada hakikatnya adalah perang rakyat semesta yang sekaligus bergerak di lapangan politik, ekonomi, militer, sosial, dan kultural yang dilakukan secara totaliter.<sup>9</sup> Dengan demikian, perang kemerdekaan yang terjadi di Indonesia tidak hanya dalam aspek militer, melainkan juga politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>10</sup> Skripsi ini mengambil periode awal tahun 1948 dengan alasan tahun tersebut merupakan awal dari masa Bambang Sugeng menjabat sebagai Panglima Divisi/GM III. Adapun tahun 1949 dipilih sebagai tahun akhir dari skripsi ini karena pada tahun inilah kedudukan Bambang Sugeng mengalami mobiltas sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Indonesia.

Lingkup Spasial dalam skripsi ini adalah wilayah Jawa Tengah bagian barat dan Yogyakarta yang menjadi wilayah kekuasaan Divisi III. Daerah itu meliputi wilayah bekas karasidenan Kedu, Banyumas, Pekalongan dan Yogyakarta.<sup>11</sup>

Sementara itu, lingkup keilmuan yang dikaji dalam skripsi ini adalah sejarah militer. Sejarah militer merupakan suatu dokumentasi baik secara tertulis maupun tidak mengenai kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia yang masuk dalam kategori konflik dan mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sejarah militer yang dikaji adalah sejarah militer yang berkaitan dengan peranan tokoh Bambang Sugeng dalam perkembangan militer di Indonesia.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup yang telah diuraikan, maka skripsi ini bertujuan untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

*Pertama*, menjelaskan tokoh Bambang Sugeng yang memegang pimpinan pasukan sejak BKR hingga Panglima Divisi III, tetapi tidak dikenal sebagai prajurit

---

<sup>9</sup>A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 1*, (Bandung: Angkasa, 1976)

<sup>10</sup>Tan Malaka, *Gerpolek: Gerilya-Politik-Ekonomi*, (Yogyakarta: Narasi, 2011)

<sup>11</sup>Hartono, *Panglima Bambang Sugeng...*, hlm. 48



yang terlibat dalam peristiwa yang dialaminya. *Kedua*, mendeskripsikan perjalanan karir militer Bambang Sugeng hingga menjadi Panglima Divisi/GM III. *Ketiga*, menganalisis peranan yang dilakukan Bambang Sugeng sebagai Panglima dalam upaya menghadapi Pendudukan Belanda.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Skripsi ini menggunakan beberapa sumber pustaka yang dijadikan acuan, antara lain:

*Pertama*, buku dengan judul “*Geger Doorstoot Perjuangan Rakyat Temanggung*” yang ditulis oleh Husni Thamrin. Buku ini menjelaskan tentang perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Temanggung pada periode 1945-1950. Secara ringkas, buku ini menjelaskan tentang perjuangan fisik rakyat yang dimulai pada masa akhir Pendudukan Jepang dimana mereka melakukan perlawanan secara tradisional. Setelah Indonesia merdeka dan Sekutu datang ke Indonesia, rakyat Temanggung melakukan perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan bersenjata yang mereka lakukan terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah rakyat yang bergabung dalam BKR dibawah pimpinan Bambang Sugeng dan kelompok kedua yang merupakan laskar rakyat bersenjata bambu runcing. Dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan rakyat Temanggung yang mayoritas bersenjata tradisional itu mengalami banyak kekalahan. Hal ini karena tidak sebanding antara kekuatan yang mereka miliki dan kekuatan musuh.

Relevansi dari buku ini dengan skripsi adalah posisi sentral Bambang Sugeng yang berawal sebagai pemimpin BKR di Temanggung setelah adanya keputusan dari Komisi Nasional Indonesia Daerah (KNID). Peranan Bambang Sugeng ditonjolkan dengan keterlibatannya menjadi pemimpin perjuangan bagi rakyat Temanggung. Dalam perjalanan karir-nya, Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III juga dijelaskan dalam buku ini. Sebagai Panglima Divisi III yang berkedudukan di Yogyakarta, Bambang Sugeng dijelaskan bahwa ia sebagai pemberi perintah serangan serentak atas Yogyakarta pada 25 Februari hingga 1 Maret 1949.

Perbedaan pustaka ini dengan skripsi adalah terletak pada fokus penelitiannya. Dalam buku ini penulis memfokuskan penelitiannya hanya di wilayah Temanggung dan dalam kurun waktu 1945-1950. Selanjutnya, tema yang diangkat dari buku ini adalah perjuangan rakyat di seluruh wilayah Temanggung baik rakyat kecil yang hanya bersenjatakan tradisional bambu runcing maupun mereka yang masuk dalam BKR dan bersenjatakan senapan. Buku ini tidak ditulis oleh sejarawan, sehingga menunjukkan cara pandang yang berbeda. Dalam buku ini penulis menjelaskan peristiwa yang terjadi masih secara umum. Fakta-fakta yang didapat dari sumber dijelaskan secara singkat dan tidak menggunakan pendekatan ilmu sosial tertentu. Gaya penulisan dari pustaka ini menggunakan bahasa yang sederhana dan hanya dalam bentuk narasi. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber-sumber sekunder yang berupa buku-buku sebagai acuan.

Dalam karya ini dijelaskan tentang upaya yang dilakukan rakyat Temanggung untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia mulai dari rakyat biasa yang bersenjatakan bambu runcing hingga kalangan militer yang merupakan mantan tentara Pembela Tanah Air (PETA) maupun *Koninklijk Nederlandsch- Indische Leger* (KNIL). Mereka kemudian bergabung dalam BKR yang diorganisir di bawah kepemimpinan Bambang Sugeng. Berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Temanggung juga dijelaskan dalam buku ini seperti pembantaian massal di Kali Progo, pelucutan senjata tentara Jepang, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), Ageresi Militer Belanda, pertahanan gerilya di lereng Gunung Sumbing, dan serangan balasan terhadap Belanda.

Berbeda dengan pustaka tersebut, skripsi ini ditulis dengan fokus penelitiannya pada peranan Kolonel Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III. Selain itu, skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan politik-militer dan juga didukung dengan sumber-sumber primer yang berupa arsip-arsip militer. Oleh karena itu, skripsi ini ditulis untuk melengkapi suatu kajian tentang Tokoh Bambang Sugeng.

Pustaka *kedua*, adalah "*Sekitar Perang Kemerdekaan*" yang ditulis oleh Abdul Haris Nasution. Kedatangan Sekutu dan Belanda ke Indonesia beserta dampaknya bagi Indonesia dijelaskan secara lengkap. Buku yang terdiri dari 11 jilid

itu mengisahkan tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, dan militer di wilayah Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan hingga terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB). Berbagai peristiwa yang terjadi di Republik Indonesia setelah kemerdekaan dijelaskan secara rinci. Setelah tentara Sekutu dan Belanda datang, Indonesia kemudian harus menghadapi ancaman besar dan terjadi perang kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan militer di Indonesia dijelaskan secara lengkap dengan pembagian wilayah militer dalam divisi-divisi. Perang gerilya yang terjadi dalam divisi-divisi ini dan juga pertahanannya dijelaskan secara lengkap dengan taktik operasinya. Buku ini juga menampilkan tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam setiap divisi untuk keberlangsungan perang gerilya.

Relevansi dari buku ini dengan skripsi adalah berisi informasi tentang kondisi di daerah-daerah di Indonesia pada masa Perang kemerdekaan. Di wilayah Jawa, A.H Nasution menjelaskan bagaimana Divisi III bergerak menyerang tentara Sekutu dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Peranan Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III selama periode 1945-1949 dapat diketahui melalui informasi yang tertuang dalam buku ini. Dalam buku jilid 8, 9, dan 10 peranan Bambang Sugeng dalam kegiatan militer di Divisi III disebutkan secara jelas. Hal itu antara lain; membubarkan semua organisasi yang berpihak kepada PKI dan menangkap para pemimpinnya, mempersiapkan untuk menghadapi Agresi Militer Belanda II, dan mengeluarkan maklumat untuk menangkis provokasi dalam tubuh TNI. Buku ini ditulis sendiri oleh A.H Nasution yang merupakan pelaku dari Perang Kemerdekaan yang pada waktu itu menjadi Kepala Komando Teritorium Jawa. Beliau menjelaskan secara rinci semua peristiwa yang terjadi di daerah beserta tokoh-tokoh yang menjadi pemimpinnya.

Perbedaan pustaka ini dengan skripsi adalah buku ini disusun tidak sebagai buku sejarah, melainkan ditulis sesuai dengan catatan peristiwa yang terjadi selama masa Perang Kemerdekaan. Fakta-fakta sejarah yang didapat diuraikan secara runtut namun dalam bahasa yang sederhana. Selain itu, penulis tidak menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Berbagai peristiwa yang terjadi dijelaskan hanya dari sudut pandang militer. Selain itu, jajaran fakta hanya diuraikan secara kronologis

dan berdasarkan pengetahuan penulis. Pustaka ini berisi serangkaian peristiwa yang terjadi selama Perang Kemerdekaan. Tokoh Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III hanya sedikit disinggung. Akan tetapi, pelaksanaan dari Perang Kemerdekaan yang terjadi di wilayah Divisi III dijelaskan secara rinci.

Berbeda dengan pustaka tersebut, skripsi ini hanya memfokuskan pada peranan yang dilakukan oleh Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III dalam mengatur strategi dan taktik untuk menghadapi serangan Belanda. Fokus dari skripsi ini disajikan dalam bentuk analisis fakta dan selanjutnya diuraikan dengan pendekatan politik-militer. Selain itu, skripsi ini ditulis menggunakan metode sejarah yang bertujuan untuk melengkapi pustaka tersebut.

Pustaka ketiga adalah "*Panglima Bambang Sugeng Panglima Komando Pertempuran Merebut Kembali Ibu Kota Djogja Kembali 1949 dan Seorang Diplomat*" yang ditulis oleh Edi Hartono. Buku ini berisi tentang biografi Bambang Sugeng. Selain itu, buku ini juga menyebutkan kesan-kesan dan komentar tentang Bambang Sugeng dari tokoh-tokoh penting dalam militer seperti A.H Nasution, T.B Simatupang, dan Batara Hutagalung. Dalam buku ini Bambang Sugeng diceritakan dari awal masa kanak-kanak yang lahir di Tegalrejo, masa menjalani karir di militer, sebagai penggagas Piagam Djogja 1955, dan menjadi seorang duta besar setelah ia meninggalkan karirnya di militer. Buku ini merupakan revisi dari karya resmi versi TNI-AD yang dimaksudkan untuk mengenang perjuangannya.

Relevansi dari buku ini dengan skripsi adalah berisi tentang informasi kehidupan Bambang Sugeng, terutama dalam karir militernya. Bambang Sugeng yang berawal sebagai pemimpin BKR di Temanggung dijelaskan dalam buku ini. Dalam perjalanan karirnya, Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi/GM III juga dijelaskan dalam buku ini. Selain itu, buku ini berisi kesaksian dari para tokoh-tokoh yang mengetahui betul sosok Bambang Sugeng. Mereka adalah teman seperjuangannya, anak-anak, keluarga dan sejarawan senior yang telah mengetahui seluk-beluk Serangan Umum 1 Maret 1949. Kesaksian-kesaksian yang dituliskan dalam buku ini berdasarkan wawancara langsung dengan para tokoh yang bersangkutan. Selain itu, dalam beberapa bagian penulis menggunakan data militer untuk mendukung pustaka ini.

Perbedaan pustaka ini dengan skripsi adalah terletak pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan dari pustaka ini adalah menjelaskan tokoh Bambang Sugeng sebagai Panglima TNI yang memimpin perang selama masa Perang Kemerdekaan dan sebagai seorang Diplomat setelah ia meninggalkan karir militernya. Pembahasan sosok Bambang Sugeng sebagai prajurit yang berkarir di militer hanya dijelaskan dalam pembahasan singkat. Selain itu, dalam pustaka ini pembahasan mengenai tokoh Bambang Sugeng lebih ditekankan sebagai seorang diplomat. Buku ini ditulis dengan metode sejarah, namun belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari cara penulis menyajikan fakta-fakta yang didapat. Fakta-fakta itu disajikan hanya dalam bentuk naratif singkat tanpa adanya pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dalam pustaka ini kehidupan Bambang Sugeng telah dijelaskan, namun masih dalam bentuk singkat terutama peranannya sebagai Panglima Divisi/ GM III 1948-1949.

Berbeda dengan pustaka tersebut, skripsi ini memfokuskan pada peranan yang dilakukan oleh Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi/ GM III pada 1948-1949. Hal itu di antaranya berbagai analisis mengenai penguatan organisasi, persiapan strategi dan taktik dalam menghadapi operasi. Selain itu, skripsi ini menggunakan pendekatan politik-militer yang bertujuan untuk melengkapi pustaka tersebut.

Pustaka keempat adalah "*Rute Perjuangan Gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman*" yang ditulis oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat (Disbintalad). Buku ini berisi tentang riwayat perjuangan gerilya Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Sudirman ketika menghadapi Agresi Militer Belanda II. Dalam buku ini dijelaskan tentang kondisi kota Yogyakarta menjelang Agresi Militer Belanda II, rute perjuangan Pangsar Jenderal Sudirman, dan dampak dari perjuangan gerilya Pangsar. Dalam buku ini, Pangsar Jenderal Sudirman dijelaskan secara rinci mengenai status dan perintah-perintah siasatnya untuk melancarkan serangan gerilya. Jenderal Sudirman yang menjadi Pangsar dijelaskan mengenai bagaimana dia memimpin dan memberikan perintah kepada bawahannya. Dalam melaksanakan perang gerilya itu, perintah-perintah siasat maupun instruksi yang dikeluarkan oleh Pangsar kemudian ditindaklanjuti oleh bawahannya seperti

Markas Besar Komando Djawa (MBKD) dan kemudian ditindaklanjuti oleh Panglima Divisi.

Relevansi buku ini dengan skripsi adalah buku ini menjelaskan tentang kondisi kota Yogyakarta yang merupakan wilayah bagian dari Divisi III dalam kurun waktu menjelang Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Buku ini juga menjelaskan alur perintah siasat dalam menghadapi Belanda secara jelas. Hal ini antara lain dengan perintah Siasat No. 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Besar, perintah siasat itu kemudian ditindaklanjuti oleh MBKD dan diteruskan kepada setiap Divisi di Jawa untuk segera dilaksanakan. Selain itu, buku ini juga menjelaskan pelaksanaan gerilya di daerah Divisi III yang terbagi dalam 3 Wehrkreise. Buku ini ditulis secara resmi oleh Angkatan Darat dan dilengkapi dengan sumber-sumber militer yang tidak perlu diragukan.

Perbedaan pustaka ini dengan skripsi adalah pada fokus pembahasannya. Pustaka ini memfokuskan tentang Jenderal Sudirman sebagai Pangsar yang memimpin perjuangan gerilya. Jenderal Sudirman dijelaskan mengenai bagaimana ia memimpin pasukan untuk melakukan serangan gerilya, rute-rute perjuangan gerilya yang dilakukan, dan bagaimana ia mengatur siasat perintah. Pustaka ini ditulis dengan sudut pandang militer murni. Fakta-fakta yang diuraikan dalam pustaka ini hanya berdasarkan data-data yang dihimpun dari pihak militer.

Berbeda dengan pustaka tersebut, skripsi ini difokuskan pada pembahasan tokoh Bambang Sugeng yang menjadi Panglima Divisi bawahan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selain itu, skripsi ini tidak hanya menjelaskan kota Yogyakarta tetapi juga semua wilayah yang masuk dalam daerah Divisi III. Hal itu antara lain wilayah Karasidenan Kedu, Banyumas, Pekalongan, dan Provinsi Yogyakarta. Skripsi ini disusun menggunakan metode sejarah dan menghimpun data-data tidak hanya dari dokumen resmi militer, melainkan juga data-data dari lembaga kearsipan lainnya. Oleh karena itu, fakta-fakta yang diuraikan dalam skripsi ini menggunakan analisis dan pendekatan politik-militer. Dengan demikian, skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi dari pustaka tersebut.

Pustaka kelima adalah "*Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Latar Belakang dan Pengaruhnya*" yang ditulis oleh Seskoad. Buku ini menjelaskan

tentang Serangan Umum 1 Maret yang dilaksanakan di Yogyakarta. Dalam buku ini dijelaskan tentang kondisi kota Yogyakarta menjelang Serangan Umum, kegiatan gerilya Wehkreise III, latar belakang dan tujuan Serangan Umum 1 Maret, persiapan dan rencana operasi, pelaksanaan operasi, dan pengaruh Serangan Umum 1 Maret 1949 secara politik dan sosial terhadap dunia Internasional, BFO, Indonesia, maupun Belanda.

Relevansi dari buku ini dengan skripsi adalah informasi mengenai Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III yang menjadi pemberi perintah siasat itu dapat diperoleh dari buku ini. Hubungan antara Bambang Sugeng sebagai pemberi perintah dan Soeharto sebagai pimpinan pelaksana serangan Umum dijelaskan secara lengkap dalam buku ini. Setelah Bambang Sugeng melaksanakan amanah dari MBKD untuk membentuk kesatuan Wehkreise dan Sub Wehkreise, Letkol Soeharto kemudian mengendalikan kesatuan tersebut khususnya di wilayah Wehkreise III. Pelaksanaan dari operasi-operasi yang diperintahkan oleh Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi dijelaskan secara lengkap dalam pustaka ini.

Perbedaan pustaka ini dengan skripsi adalah pada fokus pembahasannya. Tema yang diangkat dalam pustaka ini menekankan pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret dijelaskan mulai dari latar belakang hingga dampaknya dari peristiwa tersebut. Pustaka ini ditulis dengan pendekatan militer secara murni. Fakta-fakta yang disajikan dalam pustaka ini 90% menggunakan data militer. Penulis dalam menyusun pustaka ini juga menggunakan buku-buku militer untuk dijadikan rujukan. Selain itu, pustaka ini lebih besar menonjolkan peran Letkol Soeharto yang menjadi tokoh utama dalam pimpinan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Berbeda dengan pustaka tersebut, skripsi ini memfokuskan pada peranan Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III yang merupakan atasan dari Letkol Soeharto dan pemberi perintah serangan serentak dalam rangka melancarkan serangan balasan kepada Belanda. Pembahasan skripsi ini tidak hanya pelaksanaan perang gerilya maupun serangan serentak yang dilakukan di wilayah WK III melainkan juga perang gerilya yang dilakukan di wilayah lain yang masuk dalam wilayah Divisi III. Selain itu, skripsi ini tidak hanya menggunakan pendekatan

militer namun juga pendekatan politik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan dari Kolonel Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III. Fakta-fakta yang didapat dari berbagai sumber militer kemudian diinterpretasi dan dianalisis menggunakan pendekatan ilmu politik. Dengan adanya perbedaan penulisan tersebut, maka skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dari pustaka tersebut.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Prajurit TNI merupakan elemen penegak dari keberadaan suatu negara. Prajurit TNI tidak hanya sebagai alat pemerintah belaka, melainkan alat, abdi, dan juga pelopor bagi perjuangan kemerdekaan, ideologi rakyat serta negara.<sup>12</sup> Perjuangan seorang prajurit merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang warga negara sebagai tanda ketaatan untuk mempertahankan negaranya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perjuangan dapat diartikan sebagai usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya.<sup>13</sup> Kesukaran dan bahaya yang dihadapi merupakan tantangan besar bagi seseorang yang melakukan suatu perjuangan. Seseorang yang melakukan perjuangan, dikenal dengan istilah pejuang.<sup>14</sup> Pejuang merupakan perjuangan yang dilakukan oleh seseorang yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memperoleh apa yang dicita-citakan. Pejuang kemerdekaan termasuk juga prajurit adalah orang yang berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prajurit merupakan anggota angkatan darat dan udara tanpa memandang pangkat.<sup>15</sup> Menurut Amos Perlmutter, terdapat tiga macam prajurit dalam negara nasional modern. Mereka adalah adalah *pertama*, prajurit

---

<sup>12</sup>A. H Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya*, (Yogyakarta: Narasi, 2012), hlm. 143

<sup>13</sup>“Arti kata "perjuangan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, (<http://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/perjuangan> diakses pada 05 Maret 2017)

<sup>14</sup>Pengertian “Pejuang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

<sup>15</sup>Pengertian “Prajurit” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)



profesional klasik yang hadir dalam sistem politik yang stabil. *Kedua*, prajurit pretorian yang berkembang dalam lingkungan politik yang tidak stabil. *Ketiga*, prajurit revolusioner yang terikat pada orde politik yang stabil meski berasal dari suatu sistem politik baru atau sistem politik yang sedang merosot dan tidak stabil.<sup>16</sup> Berdasarkan ketiga kategori prajurit tersebut, TNI digolongkan sebagai prajurit profesional maupun revolusioner. Akan tetapi, mengingat fungsi sosial-politiknya, TNI juga memiliki sifat pretorian. Demikian perlu ditambahkan kategori pretorian *revolutionary armies* untuk golongan prajurit yang menjadi Tentara Nasional Indonesia.<sup>17</sup> Sementara itu, seorang prajurit yang dimaksud dalam skripsi ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.<sup>18</sup> Bambang Sugeng merupakan salah satu prajurit Indonesia yang tergabung dalam TNI dan melakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya kriteria jenis prajurit itu, maka Bambang Sugeng merupakan bagian dari prajurit profesional, pretorian, dan revolusioner.

Tahun 1948-1949 merupakan masa yang penuh dinamika yaitu masa Perang Kemerdekaan di Indonesia. Masa ini masuk dalam kategori periode revolusi atau masa Perang Kemerdekaan yang terjadi dalam kurun waktu 1945-1949. Revolusi merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri, sementara penelitian akademis tentang hal ini berusaha untuk mendapatkan semacam tatanan mengenai masa yang pada dasarnya kacau-balau.<sup>19</sup> Revolusi merupakan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan

---

<sup>16</sup>Amos Perlmutter dalam A. S. S Tambunan, *Pejuang dan Prajurit Konsep dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 16

<sup>17</sup>Tambunan, *Pejuang dan Prajurit...*, hlm. 17

<sup>18</sup>Pengertian prajurit menurut UU NO 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bab VII Pasal 21.

<sup>19</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* terjemahan Tim Penerjemah Serambi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 446

cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, revolusi dapat terjadi apabila terdapat syarat-syarat meliputi; adanya keinginan umum masyarakat untuk mengadakan suatu perubahan, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut, pemimpin dapat menampung keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas menjadi program dan arah gerakan, dan pemimpin harus dapat menunjukkan suatu tujuan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Selama masa Revolusi, tatanan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang baru saja memproklamkan kemerdekaan menjadi tidak teratur. Di berbagai wilayah Indonesia terjadi kekacauan politik dan peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan, tidak terkecuali di Jawa Tengah bagian barat dan Yogyakarta yang juga menjadi sasaran tentara Sekutu dan Belanda.

Divisi merupakan satuan militer yang besar (jumlahnya sampai puluhan ribu) yang biasanya lengkap dengan peralatannya, dipimpin oleh perwira tinggi.<sup>21</sup> Divisi III merupakan organisasi lembaga militer yang membawahi wilayah Jawa Tengah bagian barat (Banyumas, Kedu dan Pekalongan) dan Yogyakarta. Divisi ini terbentuk pada 3 Juni 1947 setelah adanya dekrit presiden nomor 14 tentang peleburan Divisi. Divisi III kemudian diberi nama Divisi Diponegoro yang merupakan kelanjutan dari Divisi Istimewa. Divisi Diponegoro/ Divisi III sebagai pusat gerakan di Jawa Tengah dan Yogyakarta dipimpin oleh Bambang Sugeng.<sup>22</sup>

Peranan Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III/ GM III dapat dijelaskan dengan konsep *status* dan *role*. Status dapat didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan

---

<sup>20</sup> Surjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 312-313

<sup>21</sup> Pengertian “Divisi” menurut KBBI online (<https://kbbi.web.id/divisi> diakses pada 03 Desember 2017)

<sup>22</sup> “Divisi Pangeran Diponegoro”, (Arsip Sejarah Daerah Jawa Tengah, Museum Mandala Bhakti)

kelompok lain.<sup>23</sup> Status berbeda dengan status sosial. Status merupakan posisi seseorang dalam kelompok. Hal ini berbeda dengan status sosial yang merupakan posisi atau tempat umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestise dan hak serta kewajibannya. Akan tetapi, untuk memudahkan pengertian dari keduanya, maka lebih dikenal dengan istilah status.<sup>24</sup> Status yang melekat pada seseorang dibagi menjadi 2 macam, yakni *Achieved-status* dan *Ascribed-status*. *Ascribed-status* merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan, kedudukan ini berdasarkan atas kelahiran. *Achieved-status* merupakan kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja dan tidak berdasarkan kelahiran. Posisi Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III merupakan tokoh sentral yang nyata bagi perjuangan Revolusi. Status yang disandang adalah *Achieved-status* yang diperoleh melalui perjalanan karirnya di militer. Sebelum menjadi Panglima Divisi III ia adalah pemimpin BKR di Temanggung, dia merupakan mantan tentara PETA pada zaman Jepang dan setelah masa kemerdekaan ia menjadi pemimpin BKR. Status dalam masa Perang kemerdekaan itu terus berlanjut hingga ia menjadi Panglima Divisi III.

Status atau kedudukan yang diterima oleh Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III kemudian menuntut untuk dapat berperan sesuai dengan kedudukannya. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status.<sup>25</sup> Peranan mencakup 3 pengertian yaitu; *pertama*, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

---

<sup>23</sup>Paul B Harton dan Chester L Hunt, *Sosiologi* terjemahan Aminuddin R dan Tita Sobari, (Jakarta: Erlangga, 1984) hlm. 118

<sup>24</sup>Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 239

<sup>25</sup>Harton, *Sosiologi*, hlm. 118

penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>26</sup> Peranan Bambang Sugeng dalam masa Revolusi Kemerdekaan 1948-1949 mencakup 3 pengertian diatas dan merupakan motor penggerak bagi perjuangan tentara Indonesia yang pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Selain konsep status dan peranan, Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III dapat dijelaskan dengan konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu dapat berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, kepemimpinan sebagai kedudukan yang berarti suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. *Kedua*, kepemimpinan sebagai suatu proses sosial yaitu kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Pada dasarnya, kepemimpinan terdiri dari 2 jenis yaitu kepemimpinan yang bersifat resmi dan tidak resmi. Kepemimpinan bersifat resmi yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan yang tidak resmi, yang mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan itu berdasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat.<sup>27</sup> Kepemimpinan yang melekat pada diri Bambang Sugeng merupakan kepemimpinan dalam konteks kedudukan sebagai seorang Panglima, berupa proses sosial yang mengarahkan kepada anggota Divisi III untuk berperang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, dan bersifat resmi yang menjabat sebagai Panglima Divisi III sekaligus Gubernur Militer III.

Pendudukan merupakan suatu proses, cara, perbuatan untuk menduduki (merebut atau menguasai) suatu daerah sehingga daerah tersebut dapat diduduki (direbut dan dikuasai) oleh tentara asing.<sup>28</sup> Pendudukan Belanda di Indonesia yang terjadi pada tahun 1945-1949 merupakan suatu usaha untuk menguasai kembali

---

<sup>26</sup>Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, hlm. 244

<sup>27</sup>Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 288

<sup>28</sup>Pengertian “ Pendudukan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

wilayah negara. Selama masa perang tersebut, setelah adanya Agresi Militer Belanda pertama dan kedua, Belanda memerlukan kebebasan dalam bertindak secara militer, yang dirasakan di semua jenjang, baik perwira tinggi maupun prajurit.<sup>29</sup>

Bambang Sugeng sebagai seorang Panglima Divisi III/GM III dapat dijelaskan dengan konsep prajurit yang menjadi pejuang kemerdekaan pada masa Revolusi yang penuh dengan dinamika persoalan politik-militer. Selama masa Revolusi tersebut, status Bambang Sugeng sebagai pemimpin resmi Divisi III/GM III memiliki peranan yang penting bagi keberlangsungan perjalanan gerilya TNI dalam rangka menghadapi Pendudukan Belanda di Indonesia 1948-1949.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman serta peninggalan masa lampau.<sup>30</sup> Metode sejarah mencakup empat langkah yaitu, heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), interpretasi dan historiografi.<sup>31</sup>

Dalam skripsi ini, sumber-sumber yang digunakan berasal dari beberapa lembaga kearsipan dan perpustakaan seperti Dinas Sejarah TNI-AD, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro (Museum Mandala Bhakti). Pengumpulan sumber juga dilakukan melalui penelitian lapangan di daerah terjadinya peristiwa, antara lain dengan melakukan pemotretan dan wawancara.

---

<sup>29</sup> Gert Oostindie, *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950 Kesaksian Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah*, terjemahan Susi Moeiman, dkk, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 110

<sup>30</sup> Luis Gottschlak, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 32

<sup>31</sup> Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, (Jakarta: Mega Book Store, 1984 ), hlm. 22-23

Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 macam sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa arsip-arsip yang didapat dari lembaga militer maupun Arsip Nasional Republik Indonesia seperti; Surat Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Bambang Sugeng sebagai Gubernur Militer III, Surat Perintah Bambang Sugeng untuk tawanan peristiwa Madiun, Surat Perintah Panglima Divisi III kepada Letkol Suharto untuk melakukan serangan serentak, Steamboek Bambang Sugeng yang berisi perjalanan karier Bambang Sugeng, Penggabungan kesatuan dalam Divisi III, Peleburan Divisi, Laporan keadaan daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta yang menjadi daerah kekuasaan Divisi III, Hasil Perundingan Bambang Sugeng dengan D. Huiting di Kemit tentang batas garis status quo, dan Laporan keadaan Jawa Tengah setelah pelanggaran Renville oleh pihak Belanda. Selain arsip-arsip, sumber primer yang digunakan dalam skripsi ini berupa prasasti yang berkaitan dengan tokoh Bambang Sugeng yaitu prasasti “Seloeroeh Doenia Satoe Keloearga”, yang berisi tentang pelucutan senjata tentara Jepang yang dilakukan oleh Bambang Sugeng dan prasasti “Aku Berpesan”, yang merupakan pesan terakhir Bambang Sugeng sebelum wafat. Sumber primer tertulis dalam arsip ini dapat dikatakan langka, karena sebagian besar arsip telah hilang atau rusak. Sumber primer lisan diperoleh melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang kompeten dan hadir pada masa itu. Hasil wawancara ini digunakan sebagai pelengkap sekaligus pembanding terhadap sumber tertulis. Dalam hal ini semakin banyak informasi yang dapat dikumpulkan semakin baik pula proses penelitian dan penulisan sejarah.<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan tokoh yang representatif diseleksi dan dibandingkan, sehingga akan diperoleh data yang objektif. Wawancara dilakukan dengan para informan yang dapat dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu: orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa, orang-orang yang menyaksikan peristiwa tetapi tidak terlibat secara langsung, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peristiwa tetapi mendapat keterangan dari orang yang terlibat dalam peristiwa. Mereka adalah

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Suryomihardjo, *Pemahaman Bangsa dan Masalah Historiografi*, (Jakarta: Idayu, 1975), hlm. 139

Bambang Purnomo yang merupakan adik sekaligus staf Bambang Sugeng, dan Abdullah yang merupakan seorang mantan anggota laskar rakyat.

Sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku karya para sarjana dan ahli sejarah yang relevan serta artikel-artikel yang dimuat dalam surat kabar sezaman atau bentuk penerbitan yang lain. Sumber-sumber ini berguna untuk melengkapai sumber-sumber primer dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti.

Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap berikutnya dilakukan pengujian sumber melalui kritik intern. Kritik intern dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya. Dalam hal ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi satu dengan informasi yang lain untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang sah.

Tahap ketiga adalah kegiatan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan peranan Bambang Sugeng selama Perang Kemerdekaan 1948-1949 dalam Divisi III disintesiskan melalui imajinasi, interpretasi, dan teorisasi untuk mencari hubungan antara satu fakta dengan fakta lain dalam kerangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dengan demikian, peranan Bambang Sugeng dapat dieksplanasikan dan selanjutnya dipahami secara bulat dan utuh. Dalam tahap ini, penggunaan konsep-konsep dan ilmu sosial berguna untuk menjelaskan hubungan antar-fakta, yaitu hubungan antara peranan Bambang Sugeng dengan kondisi politik-militer selama Perang Kemerdekaan dalam konteks mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahap keempat adalah penulisan sejarah atau historiografi. Dalam tahap ini, fakta-fakta yang sudah disintesiskan dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi terdiri dari **Bab I** yaitu pendahuluan yang meliputi; latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penulisan,

tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada **Bab II** ditulis mengenai gambaran umum Wilayah Teritorial Divisi III tahun 1948-1949 yang meliputi; kondisi geografi yang merupakan gambaran mengenai wilayah dan medan untuk pertempuran gerilya, kondisi demografi yang merupakan gambaran mengenai kependudukan di wilayah Divisi III, kondisi sumber daya sosial ekonomi yang merupakan potensi daerah di wilayah Divisi III, dan kondisi politik yang merupakan suatu problematika dalam masa Perang Kemerdekaan. Wilayah itu mencakup Jawa Tengah bagian barat (Banyumas, Kedu, Pekalongan) dan Yogyakarta. Kondisi wilayah Jawa Tengah diuraikan dari tahun 1948-1949 yang merupakan masa dimana Bambang Sugeng memegang kekuasaan dalam Divisi III pada saat itu.

Pada **Bab III** menjelaskan tentang profil dan perjalanan karier militer Bambang Sugeng yang meliputi; masa muda yang berawal dari masa kanak-kanak yang lahir di Tegalrejo dan kemudian tertarik untuk bergabung dalam militer, masa perjuangan awal proklamasi kemerdekaan RI yang diawali sebagai pemimpin BKR di Temanggung, dan Pengabdian sebagai Panglima Divisi III yang berkuasa pada tahun 1948-1949.

Pada **Bab IV** diuraikan mengenai Peranan Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III dalam upaya menghadapi pendudukan Belanda yang meliputi; Penguatan Pimpinan Divisi III yang berupa peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam Divisi III, Mobilisasi personal dan penguatan organisasi yang berupa penyusunan organisasi Divisi III dan penempatan anggota yang sesuai dengan keterampilannya, Pelaksanaan Operasi menghadapi Belanda yang terdiri dari perencanaan dan persiapan, pemberian instruksi dan penunjukan orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin perang gerilya, dan Strategi-Taktik dalam operasi yang berupa perang gerilya dan upaya diplomasi melalui perundingan.

Pada **Bab V** ditulis kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.